

Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat

The Effects Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Poverty In Regencies And Cities In West Java

Annisa Marni Melati

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: annisa.marni.amp17@polban.ac.id

Sudrajat

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: sudrajat.ak@polban.ac.id

Dian Imanina Burhany

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: dian.imanina@polban.ac.id

Abstract: *This study aims to test and find out how much the effect of education expenditure, health expenditure and social assistance expenditure both partially and simultaneously on the poverty of regencies and cities in West Java Province. The unit of analysis in this study were regencies and cities in West Java Province. The data used in this research is secondary data in the form of regency and city Budget Realization Report in West Java 2015-2019. This research used purposive sampling technique, the sample used in this study consist of 15 regencies and 7 cities in West Java Province. The data analysis method in this study is panel data regression analysis with the help of the Eviews application. The results of this study showed that education expenditure and health expenditure have a negative and significant effect on the poverty level partially, while social assistance expenditure has no significant effect on the poverty level. Simultaneously education expenditure, health expenditure, and social assistance expenditure has a significant effect on the poverty rate of 88,85%, while the remaining 11,15% is explained by other variables outside of this study.*

Keywords: *Education Expenditure, Health Expenditure, Social Assistance Expenditure, Poverty Rate*

1. Pendahuluan

Berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersirat bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi (Bappenas, 2004). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Masalah ini sudah ada sejak lama dan pada dasarnya masyarakat tergolong ke dalam kategori miskin bukan disebabkan karena faktor kurang sandang dan pangan, akan tetapi miskin dalam konteks minimnya akses memperoleh berbagai fasilitas. Bappenas (2008) menjelaskan bahwa “kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang dapat melibatkan berbagai sektor dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkesinambungan, seperti tingkat penghasilan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan

kondisi lingkungan.

Pemerintah Daerah melalui program-program yang difokuskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut Harniati (2010) dalam Bhinadi (2017:17) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan ialah salah satu indikator yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Begitupun dengan belanja bantuan Sosial yang merupakan pengeluaran pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, karena salah satu tujuan dari penggunaan anggaran bansos adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

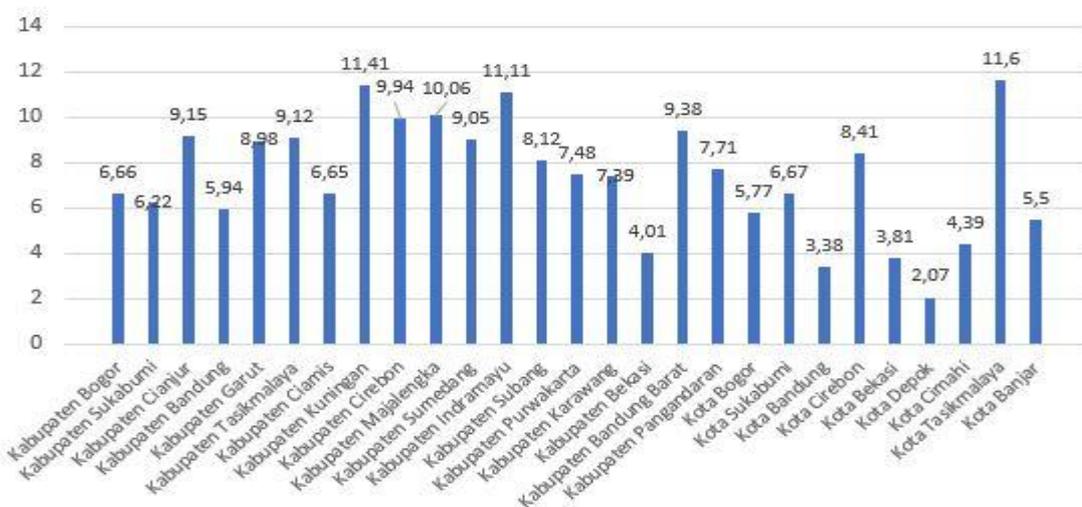
Tabel. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2015	4.435.700	9,53
2016	4.224.330	8,95
2017	4.168.440	8,71
2018	3.615.790	7,45
2019	3.399.160	6,91

Sumber: hasil olah data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019

Bersumber pada data dari BPS, untuk tahun 2019 Provinsi Jawa Barat masih memiliki jumlah penduduk miskin mencapai 3,39 juta jiwa penduduk. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya selalu terjadi penurunan, pada tahun 2015 persentase penduduk sebesar 9,53% dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 8,95%, untuk tahun 2017 menurun menjadi 8,71%, lalu pada tahun 2018 sebesar 7,45% menurun pada tahun 2019 sebesar 6,91%.

Dilansir dalam media ayobandung.com, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad menyatakan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jabar selalu menurun tiap tahunnya selama lima periode terakhir ini. Sejak tahun 2014, angka penduduk miskin di Provinsi Jabar terus menurun sebanyak 2,62%.



Sumber: hasil olah data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Gambar 2.1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Selain itu dengan selalu menurunnya angka kemiskinan di Jawa Barat, keadaan berbanding terbalik dengan adanya ketimpangan dan tidak meratanya angka kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Jabar, melihat data dari BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang tingkat persentase kemiskinannya di atas rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,91 %. Dan hal tersebut diiringi dengan ketimpangan yang cukup signifikan antar Kabupaten/Kotanya, tingkat persentase kemiskinan tertinggi ada di Kota Tasikmalaya yang mencapai 11,60% dan angka kemiskinan yang paling kecil di Kota Depok yaitu sebesar 2,07%. Selama kurun waktu 2015-2019, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya adalah Kabupaten/Kota yang persentase kemiskinannya terendah dan tertinggi di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian seperti dari Bandiyono (2018) bahwa belanja fungsi pendidikan berdampak negatif dan signifikan pada pengentasan kemiskinan, di lain hal hasil tersebut berbeda dengan yang dihasilkan oleh Palenewen et al (2018) bahwa belanja fungsi pendidikan berdampak positif dan tidak signifikan pada kemiskinan. Selanjutnya untuk belanja kesehatan, menurut Palenewen et al (2018) belanja kesehatan berdampak negatif serta signifikan pada kemiskinan, di lain sisi menurut Bandiyono (2018) mengatakan belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan untuk belanja bantuan sosial, hasil penelitian dari Rarun et al (2018) menghasilkan bahwa Belanja Bansos berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, di lain sisi hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Sendouw et al (2020) belanja bansos tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan dialami oleh suatu individu maupun kelompok yang tidak mampu menghidupi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang layak. Kemudian Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan bahwa “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran”.

2.2. Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja menurut fungsi pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Menurut Josep (2018:24), pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak maka suatu negara akan memiliki SDM yang berkualitas. Pendidikan memiliki peran yang krusial untuk suatu bangsa dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Dengan demikian program-program di bidang pendidikan mempunyai peranan yang besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi, maupun sosial.

2.3. Belanja Fungsi Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Menurut Hossain (2014) Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pengentasan kemiskinan. Penyediaan akses kesehatan bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan sebagai prioritas utama dalam program-program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, alokasi, dan penargetan program & kegiatan yang berpihak untuk penduduk miskin. Alokasi dana kesehatan oleh Pemerintah Daerah harus ditingkatkan sehingga

masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak.

2.4. Belanja Bantuan Sosial

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga mengemukakan “Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat”. Belanja bansos ini ialah pengeluaran pemerintah yang berkaitan langsung untuk pengentasan kemiskinan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dan juga menggunakan data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*, untuk data *time series* yang akan dipakai yaitu data tahunan selama lima tahun dari tahun 2015-2019, adapun untuk data *cross section* yaitu 15 Kabupaten dan 7 Kota di Jawa Barat. Alat bantu *Software* yang dipakai untuk mengolah data panel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Eviews 10*.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, DJPK dan LHP LKPD dari BPK Perwakilan Jabar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Penarikan sampel dipilih berdasarkan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tertentu tersebut terdapat beberapa Kabupaten dan Kota untuk tahun tertentu yang tidak ada realisasi belanja bantuan sosialnya atau nihil, sehingga sampel yang dipakai yaitu 15 Kabupaten dan 7 Kota. Pengujian asumsi klasik yang diterapkan sebagai persyaratan asumsi klasik yaitu uji Heterokedastisitas & Multikolinearitas.

4. Hasil dan Pembahasan (Font: Garamound, size 13)

Menuruti hasil uji pemilihan model yang terbaik yang sudah dilakukan sebelumnya, maka model paling tepat yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effects Model*. Model ini menggunakan asumsi terdapat adanya perbedaan intersep dari antar unit atau individu obyek analis, dan memiliki slope regresi yang tetap untuk unit individu ataupun berdasarkan periode waktu.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.08834	0.879427	14.88281	0.0000
BPENDIDIKAN	-0.002181	0.001032	-2.112155	0.0376
BKESEHATAN	-0.004263	0.000983	-4.334734	0.0000
BBANSOS	0.016343	0.012452	1.312497	0.1929
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.913034	Mean dependent var	9.022636	
Adjusted R-squared	0.888478	S.D. dependent var	2.876603	
S.E. of regression	0.960638	Akaike info criterion	2.954277	
Sum squared resid	78.44009	Schwarz criterion	3.568023	

Sumber: hasil olah data (2021)

Gambar 2.4. Hasil *Fixed Effects Model*

Hasil persamaan model regresi *Fixed Effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$TK = 13.08834 - 0.002181BPENDIDIKAN - 0.004263BKESEHATAN + 0.016343BBANSOS + \epsilon_{it}$$

Dari model regresi tersebut dapat diuraikan artinya seperti berikut.

- Konstanta sebesar 13,08834 yang berarti apabila nilai variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial sebesar 0, maka nilai variabel Y atau Tingkat Kemiskinan senilai 13,08834 %.
- Koefisien regresi variabel X1 bernilai -0,002181 artinya setiap peningkatan dari variabel belanja pendidikan sejumlah 1 milyar rupiah, maka diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan 0,002181 persen.
- Koefisien regresi variabel X2 senilai -0,004263 artinya setiap terjadi kenaikan dari variabel belanja kesehatan sejumlah 1 milyar rupiah, maka diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar -0,004263 persen.
- Koefisien regresi variabel X3 senilai 0,016343 berarti tiap terjadi kenaikan dari variabel belanja bantuan sosial sebesar 1 milyar rupiah, maka diikuti kenaikan angka kemiskinan senilai 0,016343 persen.

4.1 Pengujian Hipotesis

4.1.1 Uji Statistik t

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui variabel belanja pendidikan mempunyai nilai probabilitas senilai 0,0376 dan kurang dari nilai α 0,05. Sehingga menolak H01 yang artinya variabel belanja pendidikan secara parsial terdapat pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel belanja pendidikan memiliki nilai koefisien negatif, yang berarti apabila belanja pendidikan terdapat kenaikan maka angka kemiskinan menurun. variabel belanja kesehatan memiliki nilai prob 0,0000 dan kurang dari nilai α 0,05 lalu menolak H02 yang artinya variabel belanja kesehatan secara parsial memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel belanja kesehatan memiliki nilai koefisien negatif, berarti apabila belanja kesehatan terdapat peningkatan maka akan menurunkan kemiskinan. belanja bantuan sosial memiliki nilai prob. 0.1929 dan kurang dari nilai α 0,05. Maka menyetujui H03 yang artinya variabel belanja bansos secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.

4.1.2 Uji Statistik F

Diketahui nilai Prob F statistik 0,000 ($0,000 < 0,05$) sehingga menolak H0, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel belanja pendidikan, kesehatan dan bansos secara simultan berpengaruh signifikan pada kemiskinan.

4.1.3 Koefisien Determinasi

Diketahui nilai Adj R-squared (R²) senilai 0.888478 atau 88,85%, berarti bahwa variabel tingkat kemiskinan dijelaskan oleh X1, X2, X3 sebesar 88,85%, sedangkan sisanya 11,15% (100%-88,85%) digambarkan oleh faktor lainnya di luar penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan (X1) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menolak hipotesis nol yang berarti bahwa belanja fungsi pendidikan berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan. Hasil ini searah dengan penelitian terdahulu yaitu oleh Bandiyono (2018), Demak et al (2020), Misdawita dan Sari (2013),

Fithri dan Kaluge (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa Belanja Pendidikan berpengaruh negatif pada kemiskinan. Menurut Misdawita dan Sari (2013) mengatakan bahwa rata-rata penduduk kurang mampu, tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yang diakibatkan oleh kendala keuangan sehingga tidak bisa mampu mengakses dunia pendidikan. Melalui peningkatan tingkat pendidikan penduduk miskin, maka akan dapat meningkatkan keterampilan atau skill mereka sehingga mereka dapat mampu keluar dari garis kemiskinan.

Semakin besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan maka banyak masyarakat miskin yang dapat memperoleh akses pendidikan untuk tujuan peningkatan sumber daya manusia dan dapat mengurangi kemiskinan. Dengan demikian program-program di bidang pendidikan memiliki peranan yang besar terhadap kemajuan bangsa, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, maupun sosial. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Josep (2018:24) upaya pembangunan nasional pada bidang pendidikan memiliki tujuan untuk peningkatan SDM, pendidikan berperan penting bagi suatu negara dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

4.2.2 Pengaruh Belanja Kesehatan (X2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menolak hipotesis nol yang berarti bahwa belanja kesehatan berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan. Hasil tersebut searah dengan hasil penelitian oleh Palenewen et al (2018), dan Hosain (2014) bahwa pengeluaran publik dibidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penyediaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin harus ditingkatkan sebagai prioritas utama dalam program & kebijakan yang memihak kepada penduduk tidak mampu. Karena hal tersebut diperlukan perencanaan, alokasi, dan penargetan program & kegiatan yang memihak kepada penduduk miskin. Alokasi dana kesehatan oleh Pemerintah Daerah harus ditingkatkan lagi dan memperhatikan aspek pemerataannya sehingga semua masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan pembahasan sebelumnya mengenai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu keterbatasan akses kesehatan. Indikator ini dapat dilihat dari kemudahan atau kesulitan untuk menjangkau fasilitas layanan kesehatan, rendahnya kualitas layanan kesehatan, jauhnya jarak fasilitas kesehatan, dan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak murah (Bhinadi, 2017:17). Dengan adanya peran serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan penyerapan anggaran belanja kesehatan yang maksimal dan tepat sasaran untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Josep (2018:27) mengatakan bahwa “Kondisi kesehatan masyarakat ialah satu hal yang penting bagi kesuksesan pembangunan nasional, dengan masyarakat yang sehat, pembangunan pun diharapkan dapat berjalan dengan lancar”. Dengan terjaminnya kesehatan masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas kerja, sehingga penduduk miskin tersebut dapat memperoleh pekerjaan dan dapat bekerja dengan baik secara maksimal sehingga mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

4.2.3 Pengaruh Belanja Bansos (X3) Terhadap Kemiskinan (Y)

Mengacu pada *output* pengujian hipotesis diatas, maka menerima hipotesis nol yang berarti bahwa belanja bantuan sosial secara parsial tidak memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan landasan teori yang menjelaskan belanja bantuan sosial berdampak pada penurunan kemiskinan. Menurut data dari LKPD tahun 2015-2019 disebabkan karena besaran realisasi belanja bantuan sosial ini rata-rata kurang dari 1% dari total

keseluruhan belanja daerahnya dan cenderung tidak konsisten atau naik turun setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan oleh adanya belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan atau kurangnya penyerapan anggaran. Penyebab kurangnya realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena banyaknya program jaminan kesehatan dan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga usulan Bantuan Sosial dari masyarakat berkurang.

Hasil ini pada dasarnya searah dengan yang dilakukan Sendouw et al (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa belanja bansos tidak berpengaruh pada kemiskinan. Menurut Sendouw et al (2017) menyatakan bahwa “Belanja bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat yang kurang mampu belum bisa menaikkan taraf hidup masyarakat miskin yang ada di Kota Manado”. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Firmansyah (2019) mengemukakan bahwa penyaluran bantuan sosial belum mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena manfaat dan dampak yang diterima sangat rendah dan tidak mampu membantu penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, penyebab lainnya yaitu sulitnya pemda untuk mengidentifikasi penduduk kurang mampu dan ketepatan penerima bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial ini masih harus dipertahankan oleh pemerintah walaupun tidak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Penyaluran bantuan sosial ini masih diperlukan untuk jaring pengaman sosial dan untuk menekan angka kemiskinan apabila terjadi masalah sosial ataupun terjadi lonjakan kenaikan tingkat kemiskinan, seperti yang terjadi pada era Pandemi Covid-19. Menurut Kepala BPS Suhariyanto yang dilansir dalam media ekonomi.bisnis.com, mengatakan bahwa program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemda bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19 dapat meringankan angka kemiskinan. Walaupun terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin, berkat penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah ini, kenaikan penduduk miskin tidak setinggi yang diprediksikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dibahas sebelumnya, oleh karena itu diambil kesimpulan seperti berikut :

1. Belanja pendidikan berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan maka banyak masyarakat miskin yang dapat memperoleh akses pendidikan untuk tujuan peningkatan sumber daya manusia dan dapat mengurangi kemiskinan.
2. Belanja kesehatan berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Dengan adanya peran serius dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan merata, maka banyak masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.
3. Belanja bansos berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Hal ini disebabkan karena manfaat dan dampak yang diterima sangatlah kecil dan tidak mampu membantu masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, penyebab lainnya yaitu sulitnya pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin dan ketepatan penerima bantuan sosial.
4. Belanja pendidikan, kesehatan dan bansos secara simultan berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun.2015-2019. Besarnya pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 88,85% terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya 11,15% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi harga

kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi lingkungan, serta tidak meratanya program pembangunan.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2008). *Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014-2019*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Info Artha*.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Demak, S. K., Masinambow, V., & Londa, A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Elena, M. (2021, Februari 15). *Tingkat Kemiskinan Terus Naik. Apa Manfaat Program Bansos Pemerintah?* Retrieved Agustus 25, 2021, from ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210215/9/1356290/tingkat-kemiskinan-terus-naik-apa-manfaat-program-bansos-pemerintah>
- Firmansyah, A. D. (2019). *Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Di Indonesia*. Retrieved Agustus 01, 2021, from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/dampak-pemberian-bantuan-sosial-terhadap-pengentasan-kemiskinan-dan-pengurangan-ketimpangan-di-indonesia/>
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hossain, M. I. (2014). Impacts of Public Expenditure On Poverty In Bangladesh: An Empirical Analysis. *Journal of Developing Areas*.
- Josep. (2018). *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp.
- Misdawati, & Sari, A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Palenewen, T., & Walewangko, E. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*. (n.d.).
- Ranawati, N. K. (2019, Oktober 31). *Ketimpangan Tinggi, Warga Miskin Jabar Capai 3,4 Jiva*. Dipetik Desember 19, 2020, dari <https://ayobandung.com/read/2019/10/31/68737/ketimpangan-tinggi-warga-miskin-jabar-capai-34-juta-jiwa>
- Rarun, C., Kawung, G., & Niode, A. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Ritonga, H. (2004). *Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?* Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Said, A. A. (2021, Juli 27). *Peneliti Soroti Tiga Penyebab Realisasi Bansos di Daerah Rendah*. Retrieved

Agustus 25, 2021, from katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/lavinda/finansial/60ff7ed96a6cf/peneliti-soroti-tiga-penyebab-realisisi-bansos-di-daerah-rendah>

- Sendouw, A., A.Rumate, V., & Rotinsulu, D. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.